

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Kieso, dkk (2007) menyatakan laporan keuangan ialah sarana menyalurkan informasi keuangan yang utama kepada pihak eksternal perusahaan yang menampilkan kemampuan perusahaan dalam bentuk kuantitatif. Sedangkan menurut Standart Akuntansi Keuangan Th 2012 laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015) "Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan Keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain sertamateri penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan." Menurut S Mulyawan (2015) Laporan keuangan merupakan alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan yang digunakan untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Dari

laporan keuangan, dapat diketahui posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia:2016, laporan keuangan merupakan catatan informasi kinerja suatu entitas pada waktu atau periode akuntansi. Laporan keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi entitas. Menurut SAK EMKM:2018, laporan keuangan EMKM berupa Laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi & Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan menginformasikan aset, liabilitas dan ekuitas entitas akhir periode. Sedangkan Laporan kinerja/Laba Rugi menyajikan informasi akumulasi pendapatan, beban keuangan dan beban pajak yang merupakan laporan kinerja entitas dalam satu periode.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2002) laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, timing aliran kas, yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Standart Akuntansi Keuangan Th 2012, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, serta posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut (Sutrisno,2008) laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah.

2.2 UMKM

2.2.1 Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disingkat UMKM dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat 1).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat 2).
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 20 bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat 3).

Usaha Mikro Kecil Menengah atau sering disingkat dengan UMKM merupakan satu bagian penting dari perekonomian suatu negara termasuk negara Indonesia.

Usaha Kecil Menengah merupakan kegiatan yang perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UMKM di Indonesia telah dapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu Menteri Koperasi dan UMKM.

2.2.2 Asas dan Tujuan UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki delapan asas sebagai berikut:

- 1) kekeluargaan;
- 2) demokrasi ekonomi;
- 3) kebersamaan;
- 4) efisiensi berkeadilan;
- 5) berkelanjutan;
- 6) berwawasan lingkungan;
- 7) kemandirian;
- 8) keseimbangan kemajuan; dan
- 9) kesatuan ekonomi nasional.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berdasarkan ekonomi berkeadilan. Asas dan tujuan UMKM berlaku untuk keseluruhan bidang, yakni perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur.

2.2.3 Kriteria UMKM

Melihat dari UU 20 tahun 2008 yang dijelaskan di Bab IV pasal 6, kriteria UMKM dibagi berdasarkan kekayaan bersih dan omset penjualan yang diperoleh selama setahun. Kriteria masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun tidak termasuk tanah dan bangunan; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan/omzet paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha kecil dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) namun tidak termasuk tanah dan bangunan; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan/omzet lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha menengah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tidak lebih banyak dari Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan/omzet lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

4) Usaha Besar dengan kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan/omzet lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Usaha Mikro dengan jumlah karyawan 10 orang;
- 2) Usaha Kecil yang memiliki karyawan berjumlah 30 orang; dan
- 3) Usaha Menengah yang memiliki karyawan dengan jumlah hingga 30 orang.

Dalam perspektif usaha, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia mengklasifikasikan UMKM menjadi empat kelompok yaitu:

- 1) UMKM sektor informal, contohnya seperti pedagang kaki lima dan pedagang di pasar;
- 2) UMKM Mikro adalah UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya;
- 3) Usaha Kecil Dinamis adalah UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama dalam bentuk menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor; dan
- 4) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang mumpuni dan telah siap untuk bertransformasi menjadi usaha yang lebih besar lagi.

2.3 SAK EMKM

Warren et al. (2014) menyatakan bahwa dalam menyiapkan laporan keuangan, diperlukan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku secara umum untuk dijadikan sebagai pedoman. Adanya SAK memungkinkan para investor dan pemangku kepentingan untuk dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas. Di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) yang merupakan badan otorisasi yang memiliki wewenang utama dalam mengembangkan SAK. Dilansir dari situs resminya, DSAK IAI telah menerbitkan empat SAK berbeda yang disusun sesuai perkembangan dunia usaha yang ada. Keempat SAK tersebut terdiri dari PSAK IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – International Financial Report Standard), SAK Syariah, SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), dan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah).

Agar pembahasan dalam karya tulis ini relevan, penulis hanya membatasi pembahasan pada SAK EMKM saja. SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi sebagaimana yang diatur di dalam SAK ETAP. SAK yang disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 24 Oktober 2016 dan baru berlaku efektif mulai 1 Januari 2018 ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas yang memenuhi definisi dan kriteria UMKM sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana daripada SAK ETAP. Berdasarkan SAK EMKM, laporan keuangan entitas minimum terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan

laba rugi selama periode, serta catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan dengan menggunakan dasar akrual.

2.3.1 Laporan Posisi Keuangan

Menyajikan informasi mengenai asset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Tidak ditentukan format atau urutan terhadap akun- akun yang disajikan. Namun, pos-pos akun dapat disajikan berdasarkan likuiditas untuk asset dan jangka waktu jatuh tempo bagi akun liabilitas.

2.3.2 Laporan Laba Rugi

Akun-akun yang dicakup ialah pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Laporan laba rugi membuat semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. SAK EMKM (2018) mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

2.3.3 Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam catatan atas laporan keuangan dimuat pernyataan mengenai laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, dicantumkan mengenai kebijakan akuntansinya, dan informasi-informasi tambahan ataupun rincian akun. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk pada informasi yang tercantum dalam catatan atas laporan keuangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang juga meninjau kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan di UMKM telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Alda

Rose Safira (2021), UMKM Lava Pijar klasifikasi pendapatan dan pengeluaran masih belum sesuai dengan SAK EMKM. Pencatatan akuntansi Lava Pijar cabang Samarinda masih belum sesuai dengan SAK EMKM yaitu untuk klasifikasi pendapatan dan pengeluaran serta penyajian dan pengungkapan laporan laba rugi. Perlu memperbanyak literasi terkait ilmu akuntansi terutama praktik akuntansi keuangan usaha mikro kecil menengah, agar dapat menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan penting terkait kegiatan usaha dan sebagai pertimbangan kreditur jika UMKM Lava Pijar akan melakukan pinjaman dana untuk usaha.

Penelitian Faadhilah Athaya Fisanty (2021), Kwin Laundry merupakan suatu entitas usaha yang bergerak di bidang jasa laundry yang termasuk ke dalam kategori usaha mikro. Pencatatan akuntansi yang dilakukan Kwin Laundry terdiri dari dua bagian, yaitu pencatatan atas transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Laporan keuangan Kwin Laundry yang disusun sesuai SAK EMKM terdiri dari tiga bagian, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian Muthi'ah Salimah (2021), UMKM Kemboelan melakukan praktik akuntansi sederhana terhadap aset yang dimiliki. Jenis aset yang dimiliki UMKM Kemboelan terdiri dari kas, persediaan, perlengkapan, dan peralatan. Pencatatan persediaan keluar dan masuk dilakukan setiap harinya agar persediaan yang jumlahnya menipis bisa segera diproduksi kembali. Pencatatan direkap dalam bentuk excel. UMKM Kemboelan melakukan praktik akuntansi sederhana terhadap

beban yang mendukung kegiatan usaha. Beban yang dimiliki antara lain beban utilitas, beban depresiasi, dan beban perlengkapan.